

PEMBANGUNAN NASIONAL

DILEMA PERTUMBUHAN DAN KEADILAN SOSIAL

Oleh Nurcholish Madjid

Bagi mereka yang dengan serius mengikuti perkembangan negeri kita semenjak tiga dasa warsa terakhir ini, judul bahasan di atas itu pastilah tidak terasa asing lagi, jika tidak malah telah menjadi semacam klise dan kedengaran stereotipikal. Sebab, persoalan itu telah menjadi bagian dari kesadaran banyak kalangan (di negeri kita) yang terlibat dalam usaha pembangunan nasional, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dilema antara pertumbuhan dan keadilan sosial itu dicerminkan dalam ungkapan alegoris tentang pembagian “kué nasional”: Apakah kita akan berusaha memperbesar kué dan baru kelak setelah cukup besar (entah kapan dan entah seberapa besar) baru dibagi-bagi, ataukah kita akan segera membagi-bagi kepada setiap warga negara begitu setiap kali sepotong kué tercipta? Sebab, sementara usaha penciptaan kemakmuran dirasakan sebagai hal amat mendesak—jika kita tidak mau ketinggalan oleh negara-negara tetangga dengan segala akibatnya—namun, di sisi lain cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat telah menjadi kesadaran prinsipil nasional dan telah melekat sebagai bagian dari cita-cita kenegaraan kita. Ini membawa kita kepada situasi dilematis antara *imperative* pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral menciptakan keadilan sosial.

Jika persoalan itu kita simpan dalam pikiran kemudian kita pergi ke luar batas-batas nasional, kita akan mendapati bahwa ternyata situasi dilematis antara pertumbuhan dan keadilan itu

merupakan gejala universal. Ini digambarkan, misalnya, oleh Bruce A. Ackerman, yang oleh majalah *TIME* pada tahun 1977 dipilih sebagai seorang intelektual Amerika yang paling terkemuka dan “bakal mempengaruhi masa depan”. Ia membuat suatu hipotesa yang membayangkan seandainya kita ingin membuat paguyuban yang seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan dan pandangan hidup yang sama dan terdiri dari anggota-anggota yang berpikiran sama pula. Dalam situasi seperti itu pun kita masih menghadapi kemungkinan memiliki latar belakang anggota yang berbeda-beda jauh, tidak peduli bahwa yang tampil ke depan, pada peringkat intelektual dan rasional, ialah pikiran dan wawasan yang sama. Maka ketika kita dihadapkan pada jawaban individualistik tentang pemilikan kekayaan, misalnya, kita barangkali akan terlibat dalam dialog sengit seperti ini:

Orang Banyak: Kita protes. Jika kamu membagi-bagi kue dalam irisan kecil-kecil (pribadi), maka akan menjadi amat sulit bagi kita semua untuk mengetahui di mana masing-masing irisan itu dan untuk mengumpulkannya dalam suatu usaha yang saling menguntungkan.

Pemimpin: Lalu apa saran Anda yang harus kita lakukan?

Orang banyak: Laksanakan pemilihan umum atas irisan-irisan kue dalam ukuran besar, dan tugaskan kita semua atas satu irisan. Ini akan sangat mempermudah kita untuk mulai membangun masyarakat.

Penyendiri: Tetapi itu akan membuat hidupku lebih susah. Tidak ada yang kuinginkan daripada hidup menyendiri dan berbuat terhadap kue bagianku dengan damai. Kalau Anda membagi-bagi kue itu dalam irisan-irisan besar, paling tidak aku akan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum aku bisa mengiris sepotong kecil kue yang sudah sejak semula menjadi bagianku dari bongkah besar kue milik bersama itu.

Pemimpin: Lalu, bagaimana kita harus melangkah ke depan? Dan harap janganlah Anda mengajukan rencana yang mengharuskan saya untuk mengatakan bahwa suatu paguyuban yang terdiri dari para anggota dengan jalan pikiran sama adalah lebih baik atau lebih buruk daripada suasana menyendiri seorang pertapa.¹

Dilema itu dalam kehidupan nasional kita pada tahap perkembangan sekarang ini semakin menunjukkan dirinya. Pada peringkat pertama, saat-saat sekarang ini banyak dilontarkan orang bahwa kelanjutan tahap pembangunan nasional harus dititikberatkan pada pelaksanaan pembangunan yang lebih tulus dan substantif daripada nilai-nilai Pancasila. Dan pada peringkat kedua, dari nilai-nilai Pancasila itu yang semakin gencar didengungkan ialah dua nilai terakhir, yaitu Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial. Bahkan nilai Keadilan Sosial ini—yang usaha mewujudkannya untuk seluruh rakyat ditegaskan dalam konstitusi (UUD '45) sebagai tujuan kita bernegara—semakin menjadi fokus dan sumbu pikiran-pikiran reformatif untuk tahap perkembangan dan pembangunan nasional kita pada masa mendatang.

Wujud paling nyata dari dilema pertumbuhan dan keadilan itu dapat dirasakan di balik kenyataan semakin terpusatnya sumber-sumber daya—khususnya modal, keahlian, dan informasi—di tempat-tempat tertentu, yaitu di kota-kota besar. Tumbuhnya DKI Raya dan sekitarnya (Jabotabek) menjadi sebuah megapolis tidak saja merupakan fungsi gerak demografis masyarakat kita, tetapi juga memunculkan fungsi kemandekan atau immobilitas sumber-sumber daya tersebut. Bahkan gerak demografis masyarakat—terutama dalam bentuk urbanisasi—dari satu sisi dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari kemandekan pemanfaatan sumber-sumber daya itu.

Konsentrasi modal, tenaga kerja, dan informasi di tempat-tempat tertentu di Indonesia adalah juga merupakan fungsi daripada

¹ Bruce A. Ackerman, *Social Justice in the Liberal State* (New Haven, 1980), h. 171

kelangkaan. Pembangunan nasional kita di masa Orde Baru memberi tekanan kuat pada bidang ekonomi. Titik berat di bidang ekonomi ini—bila dilihat dari sudut latar belakang keadaannya di masa Orde Lama—merupakan kesadaran logis yang sifatnya mendesak (*urgent*) dan bahkan darurat (*emergent*). Kemudian, pembangunan yang demikian itu tampak jelas tidak bisa menghindarkan diri dari keharusan mengintroduksi industri-industri dengan teknologi modern dan berskala besar dan dengan sistem padat modal. Ini dengan sendirinya membawa dampak *employment* yang tidak terlalu besar, sehingga sering menjadi sasaran kritik dari sudut wawasan pemerataan dan cita-cita keadilan. Dari sini muncul masalah lain, yaitu minimnya tenaga kerja terlatih yang mampu beradaptasi dengan teknologi modern yang digunakan dalam pembangunan ini. Terbatasnya tenaga-tenaga ini dapat kita maklumi karena masyarakat kita—yang pada dasarnya masih berpola ekonomi agraris dan yang dari segi pendidikan masih terbelakang—belum mampu menyediakan (secara memadai) tenaga-tenaga yang sangat terlatih (*highly skilled*).

Persoalan-persoalan yang muncul itu menghasilkan situasi di mana kita dihadapkan pada persoalan alokasi yang tidak memadai dan tidak rasional dari sumber-sumber daya yang langka. Dan ini, pada urutannya, ikut mendorong terjadinya berbagai bentuk pola konsentrasi tersebut. Apalagi, kebanyakan industri-industri baru yang ditopang oleh modal pinjaman luar negeri mengharuskan adanya perbaikan manajemen dan efisiensi, agar mampu membayar kembali modal pinjaman itu. Maka dampaknya ialah semakin menciutnya kemungkinan menyerap tenaga kerja dalam skala besar, yang diikuti dengan semakin terkonsentrasinya berbagai kemampuan dan sumber daya.

Kenyataan-kenyataan—yang mengindikasikan adanya ketimpangan—di atas menderingkan tanda bahaya di telinga mereka yang memberi perhatian besar pada masalah keadilan sosial. Tanpa menafikan hikmah pikiran sekitar konsep delapan jalur pemerataan dan pelaksanaannya, kecenderungan immobilitas sumber-sumber

daya dan terkonsentrasinya sumber-sumber itu, jika tidak berhasil ditangani dengan tepat, bisa menjauhkan kita dari ide dan cita-cita kenegaraan.

Apalagi di negeri kita sekarang ini—sebagaimana yang juga terjadi di Amerika Serikat—terdapat kecenderungan bahwa hubungan antar-dunia usaha, khususnya yang berskala besar, semakin identik dengan hubungan keluarga. Sebagaimana dipaparkan oleh G. William Domhoff, para aristokrat bisnis tampak secara pasti menguasai sistem bisnis Amerika. Keadaan di sana pada saat ini berangkali tidak sesederhana pada saat lalu ketika dunia bisnis bisa diasosiasikan langsung dengan keluarga-keluarga tertentu yang terbatas jumlahnya. Pecahnya “kapitalisme keluarga”—berwujud menyebarkan pemilikan saham dan semakin meningkatnya jumlah kaum eksekutif bayaran—telah banyak membawa perubahan kepada sistem distribusi bisnis di Amerika. Tetapi perubahan itu—dalam pengamatan lebih luas—ternyata hanya dalam permukaan, atau hanya tertangkap mata sebagai kesan belaka, tanpa substansi yang berarti. Sebab, para anggota kelas elit Amerika masih tetap secara akrab terlibat dalam dunia bisnis, meskipun pola-pola hubungan pemilikan dan pengawasannya sekarang semakin kompleks dan membingungkan. Apalagi, pemilikan dan kontrol atas bisnis-bisnis besar adalah segi paling rahasia dari masyarakat Amerika.²

Lebih jauh, di Amerika konsentrasi kekuasaan pada kaum aristokrat bisnis itu tidak hanya terjadi pada dunia bisnis itu sendiri, tetapi juga di universitas-universitas sebagai pusat-pusat pancaran ide dan informasi. Penguasaan kaum atasan terhadap universitas-universitas adalah melalui berbagai bentuk bantuan keuangan, seperti wakaf keluarga (Universitas Stanford dan Vanderbilt), pemberian pribadi, pemberian melalui yayasan, pemberian melalui perusahaan, serta melalui berbagai layanan untuk para anggota dewan penyantun. Mekanisme itu semuanya memberi peluang

² G. William Domhoff, *Who Rules America?* (Englewood Cliffs, 1967), h. 38

kepada kaum atasan untuk menguasai kerangka yang lebih luas, tujuan-tujuan jangka panjang, dan suasana akademis yang ada di universitas. Memang tidak semua bantuan itu selalu memberi mereka kemampuan ataupun peluang untuk melakukan kontrol harian terhadap opini-opini yang dihasilkan oleh universitas. Apalagi sistem *tenure* (penempatan seseorang sebagai tenaga pengajar tetap dan penuh) membuat seorang profesor tidak mungkin digeser oleh siapa pun tanpa kesalahan luar biasa. Namun, tidak urung berbagai bantuan finansial kaum atasan telah menolong menciptakan universitas “model” yang kemudian diikuti oleh universitas-universitas lain. Universitas “model” ini juga menetapkan standar mutu yang kemudian ditiru universitas-universitas lain. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa kaum atasan itu lebih senang jika uang bantuan mereka digunakan untuk pendidikan teknis dan praktis di universitas yang mereka pengaruhi, dan tidak untuk pendidikan liberal klasik tradisional. Kenyataan ini terlihat dengan jelas sekali pada lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas Rochester. Sebagian besar anggota dewan penyantunnya terdiri dari pejabat perusahaan yang berpusat di Rochester, seperti Eastman Kodak, Xerox, dan Taylor Instrument. Ketua dewan penyantun itu, yang juga presiden direktur perusahaan Xerox, menerangkan pola hubungan itu sebagai berikut:

To put it as Crassly as possible, it's a matter of sheer self-interest—dollars and cents. Xerox will live or die by technology.³

(Untuk mengatakannya secara sejelas mungkin, hubungan itu adalah semata-mata masalah kepentingan pribadi—dolar dan sen, [yakni, uang]. Xerox akan mati atau hidup oleh tekhnologi).

Anologi dengan keadaan di sana itu, dan berdasarkan gejala-gejala di tanah air kita sekarang ini, maka dengan cukup mudah kita bisa

³ Domhof, *Op. cit.*, h. 77-78

melihat kemungkinan apa yang bakal terjadi pada negara kita di masa mendatang. Dalam menghadapi kenyataan ini, semua mereka yang *concerned* dengan masalah keadilan sosial dituntut untuk memiliki kearifan yang tinggi. Sebab, kembali pada metafor “kué” di atas, sudah sejak dari semula dikemukakan orang bahwa jika kita menunda pembagian kué dan menunggu sampai kué itu besar, maka mungkin kué itu akan tidak pernah terbagi-bagi kepada banyak orang, apalagi merata. Sebab, membuat kué supaya menjadi besar—seperti sudah dikemukakan tadi—memerlukan tangan-tangan terampil, yakni orang-orang memiliki keistimewaan (*privileged*).

Persoalan yang akan segera dihadapi oleh mereka yang *concerned* pada keadilan sosial ini adalah bahwa siapa pun yang bernasib untung dalam masyarakat, baik usahawan, politisi, kaum profesional, bahkan kaum intelektual dan para pemuka agama, selalu dengan sendirinya cenderung untuk mempertahankan nasib baiknya itu. Problem ini dipaparkan secara cukup panjang lebar oleh Ackerman:

The diverse means by which the powerful grasp hold of their advantages are wondrous to behold: the enterprising party official passes his advantages on to his children with no less avidity than does the capitalist entrepreneur. Each nation struggles to exploit all those who are born on the wrong side of the line, as does each race, each class, each caste, and most religions. Each person is told in countless ways to make the most of the opportunities given him by his genetic abilities and transactional environment—without comparing the opportunities he has received with those obtained by others. All the while, spiritual leaders of all kinds are forever slipping into an elaborate apologia for the status quo—arguing that the existing categories of exploitation represent the highest good for mankind.⁴

⁴ Ackerman, *Op. cit.*, h. 375

(Cara yang beraneka ragam yang digunakan orang-orang kuat untuk mempertahankan keberuntungan mereka adalah menakjubkan untuk diamati: seorang pengurus partai yang giat akan meneruskan keberuntungannya kepada anak-anaknya dengan cara yang tidak kurang bernafsunya daripada yang dilakukan seorang wira usahawan kapitalis. Setiap bangsa berjuang untuk mengeksploitasi semua mereka yang dilahirkan pada garis yang salah—yakni, kurang beruntung, NM—sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh setiap ras, setiap kelas, setiap kasta, dan oleh kebanyakan agama. Setiap orang diajari dengan cara yang tak terhitung banyaknya untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan kepadanya oleh kemampuan genetik (yakni, segi keturunan)-nya dan lingkungan pergaulan—tanpa membuat perbandingan antara kesempatan yang ia terima itu dengan kesempatan yang diperoleh orang-orang lain. Sementara itu, para pemimpin keruhanian dari semua jenis selamanya tergelincir pada apologia panjang-lebar untuk status quo—dengan mengajukan alasan bahwa berbagai kategori eksploitasi yang ada itu mewakili kebaikan tertinggi untuk umat manusia).

Mungkin hal ini adalah bersifat alami dan manusiawi belaka, tetapi tidak selalu baik dari segi moral. Berkenaan dengan ini, Michael Harrington—seorang intelektual sosialis baru Amerika—yang disebut sebagai berada di belakang kepresidenan J.F. Kennedy yang terkenal dengan wawasan cerahnya itu, memperingatkan:

According to the rationalization of the time, the various countries were simply doing what they could do “best” and therefore submitting to the impersonal laws of economics. People somehow failed to note that the “laws” were the artificial construction of western power. Asia, Africa, and Latin America were carefully and systematically denied the benefits of the new industrialism. They had been designated the hewers of wood and the drawers of water.⁵

⁵ Michael Harrington, *Toward a Democratic Left*, (New York, 1968), h. 175

(Sesuai dengan rasionalisasi saat itu, berbagai negara semata-mata hanyalah melakukan apa yang dapat dilakukan secara paling baik dan karenanya tunduk kepada hukum-hukum ekonomi yang tak berpribadi. Tetapi orang lupa mencatat bahwa “hukum-hukum” itu adalah konstruksi yang dibuat oleh kekuatan Barat. Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara cermat dan sistematis dijauhkan dari manfaat industrialisme baru. Mereka ini telah ditentukan sebelumnya sebagai pengumpul kayu bakar dan penimba air saja).

Mengingat keadaan dunia saat ini, tuntutan mewujudkan keadilan sosial agaknya mengharuskan kita semua menjadi pejuang-pejuang gigih yang membela terwujudnya tujuan nasional bernegara itu. Dan setiap cita-cita besar memang mengharuskan adanya pejuang-pejuang gigih serupa itu. Tetapi, suatu cita-cita luhur juga dapat menjadi rusak oleh “semangat perjuangan” yang berlebihan, yang mengarah pada fanatisme dan tindakan tanpa perhitungan. Suatu masyarakat yang seluruhnya terdiri dari kaum fanatik—yang masing-masing bersedia mengorbankan dirinya secara tanpa perhitungan demi suatu cita-cita, betapa pun luhurnya seperti cita-cita keadilan sosial—akan segera kehilangan kesadarannya tentang makna cita-cita itu sendiri, yang pada mulanya cita-cita inilah yang memberikan motivasi untuk bersemangat dalam kegiatannya. Apalagi, tujuan keadilan sosial dalam suatu masyarakat Pancasila kiranya bukanlah untuk membentuk masyarakat yang baru sama sekali—yang secara radikal lain dari yang ada sekarang—dan di situ semua seperti diperbudak atas nama cita-cita bersama yang serba hebat. Sebaliknya, cita-cita keadilan sosial dalam negara Pancasila kiranya ialah untuk membangun suatu bentuk tatanan masyarakat yang di situ setiap warga dijamin haknya untuk hidup menurut pilihannya sendiri, namun tetap dalam semangat kebersamaan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, seperti telah dikemukakan, dalam menghadapi problema ini kita dituntut untuk cukup arif.

Memang harus diakui—kalau kita menggunakan kerangka pandangan serupa itu—tidak ada cara penyelesaian sederhana

bagi persoalan kita tersebut. Dalam konteks ini, yang termasuk prinsip penting dalam usaha mewujudkan keadilan sosial adalah hendaknya kita tidak dengan mudah menjadi semacam “penyederhana agung” (*grand simplificateurs*) dalam menghadapi masalah yang menyangkut berbagai kepentingan ini. Kita harus waspada terhadap kaum “revolusioner” yang bernafsu menguasai opini umum dan merasa paling “berjuang”, sebagaimana kita juga harus waspada terhadap kaum individualis yang tak berperasaan, tidak *tepo seliro*, dan egois. Semangat cita-cita Pancasila ialah suatu tatanan masyarakat yang menjamin setiap warganya memperoleh kebebasan bertindak—dan tidak perlu lagi dibatasi bahwa tindakan itu harus bertanggung jawab—dalam lingkungan struktur kekuasaan yang adil.

Kewaspadaan itu juga harus kita tujukan kepada diri sendiri dalam suatu semangat introspeksi. Sebab, tidak tertutup kemungkinan bahwa ketegangan dan erosi moral itu juga terjadi pada kehidupan pribadi kita. Orang-orang yang kebetulan beruntung harus menghadapi kenyataan bahwa kita tidak berhak menggunakan semua kemampuan yang ada di tangan kita untuk mengejar lebih jauh tujuan-tujuan pribadi kita. Kalau boleh jujur, kiranya cukup banyak dari kita harus mengakui tidak bisa menghindarkan diri dari penggunaan kekuasaan—termasuk kekuasaan dalam bentuk kelebihan atau keunggulan pribadi—sepanjang hidup kita, meskipun penggunaan kekuasaan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan oleh pegangan hidup ideal kita sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang berkedudukan istimewa tidak bisa begitu saja menghapuskan konflik pribadi yang dialaminya, yaitu antara usahanya meningkatkan kepentingan diri sendiri dan tuntutan mewujudkan keadilan sosial.

Lebih jauh, penting sekali kita sadari dan ketahui, bahwa adanya tensi moral serupa itu tidak hanya monopoli masyarakat-masyarakat kapitalis, atau masyarakat “kapitalis malu-malu” (cemoooh yang dilontarkan Dr. Afief Budiman untuk sistem kita di Orde Baru ini). Seperti dikatakan oleh Julius Nyerere—seorang

tokoh sosialis-humanis paling terkemuka di Afrika—negeri-negeri komunis pun menunjukkan gejala-gejala bertingkah laku seperti kaum kapitalis. Bahkan mereka itu, menurut Harrington, tidak hanya melakukan penindasan ekonomi dan kekayaan material belaka seperti masyarakat kapitalis, tetapi juga melakukan perampasan hak kebebasan politik negara-negara “satelit”. Dalam kaitan ini Nyerere menyatakan:

Socialist Countries, no less than capitalist Countries, are prepared to behave like the millionaire—to use millions to destroy the other “millionaire”, and it need not be a capitalist millionaire—it is just as likely to be a socialist “millionaire”. In other words socialist wealth now tolerates poverty, which is an even more unforgivable crime... don’t forget that rich countries... may be found on either side of the division between the capitalist and socialist countries.⁶

(Negeri-negeri Sosialis, tidak kurang dari negeri-negeri kapitalis, bersiap-siap untuk bertingkah laku seperti jutawan—yaitu menggunakan jumlah berjuta-juta untuk menghancurkan “jutawan” yang lain, dan jutawan yang lain itu tidak mesti seorang jutawan kapitalis—terdapat kemungkinan yang sama untuk menjadi “jutawan” sosialis. Dalam perkataan lain kekayaan sosialis sekarang menenggang kemiskinan, yang kemiskinan itu adalah lebih-lebih lagi suatu kejahatan yang tak terampuni ... jangan lupa bahwa negeri-negeri kaya... juga bisa ditemukan pada sisi lain pembagian antara negeri-negeri kapitalis dan sosialis).

Semua keterangan di atas memang dapat menimbulkan kebingungan dan rasa tidak pasti. Tetapi, barangkali benar jika dikatakan bahwa lebih baik bimbang daripada berpasti-pasti (*assertive*) namun ternyata salah. Seperti dikatakan Ackerman, di

⁶ Dikutip dalam Harrington, *Ibid.*, h. 195

satu pihak, seseorang barangkali menindas keraguan sendiri, dengan sikap menolak untuk mempertimbangkan apakah sungguh pandangannya itu beralasan. Tetapi, dengan sikap ini berarti dia menutup sama sekali kemungkinan untuk dirinya dari mendapatkan jawaban dan solusi persoalannya secara benar atau secara lebih tepat.

Di pihak lain seseorang barangkali “mengatasi” (*transcend*) keraguannya. Keraguan ini bisa diatasi setelah secara langsung dia menghadapi kemungkinan bahwa keraguannya itu mungkin berguna, namun selanjutnya dia berkesimpulan bahwa keraguannya itu tak berdasar. Jalan ke arah pengetahuan tentang hal yang baik lebih terbuka untuk orang yang “mengatasi”—bukannya “menindas”—keraguannya sendiri. Kalau kita hanya berpura-pura bahwa kita tidak ragu, kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tentang apa yang harus kita katakan jika memang mempunyai keberanian untuk secara langsung berhadapan dengan permasalahan dilematis. Tetapi sebaliknya, sikap ragu yang total dan sempurna juga tidak mungkin. Jika kita membuang begitu saja keyakinan kita yang ada sekarang, maka bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini bermakna, dan bagaimana kita memperoleh dorongan batin yang sejati untuk mencari pemecahan masalah?⁷

Maka persoalan pokoknya selalu sama untuk setiap cita-cita besar dan luhur. Tidak seorang pun bisa berharap akan menemukan pemecahan sederhana bagi masalah tarik-menarik antara dorongan alami untuk memenuhi keinginan diri sendiri dan tuntutan ideal untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam masyarakat Pancasila pun diharuskan adanya sikap realistik untuk menghadapi kenyataan ini. Jika pihak si “kuat” senantiasa tergelincir pada sikap-sikap pembelaan diri tanpa memperhatikan segi-segi dasar pembenaran—yakni, tanpa peduli kepada cita-cita luhur kesepakatan bersama—dan jika saja si “lemah” tetap saja bermimpi untuk suatu saat ganti menindas kaum penindas, maka

⁷ Ackerman, *Op. cit.*, h. 365

cita-cita keadilan sosial dalam kerangka keseluruhan Pancasila itu sendiri mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Yang diperlukan di sini ialah bagaimana kita mampu mentransformasi dilema moral kita menjadi sumber daya cipta, untuk menciptakan pola kehidupan yang memungkinkan penyusunan sistematis berbagai kenyataan yang tidak selalu bersesuaian di depan kita. Dengan begitu—melalui usaha masing-masing pribadi kita meskipun dengan cara-cara yang masih belum sempurna—kita bisa mencari kunci jawaban atas misteri kebebasan pribadi.

Sementara itu, kita harus tetap yakin bahwa ada standar moralitas, yakni tentang kebaikan, yang konstan dan obyektif, seperti obyektifnya lokomotif (menurut metafor Ackerman). Maka, sebagaimana kita merasa berhak dan bertanggung jawab secara moral untuk mencegah seseorang yang hendak menubrukkan kepalanya ke sebuah lokomotif yang sedang melaju—betapa pun ia tidak senang dengan tindakan penyelamatan kita itu—kita juga mempunyai kewajiban moral untuk ikut memikul tanggung jawab meluruskan jalan masyarakat yang kita yakini sedang bengkok. Dalam melukiskan hal ini Ackerman menyatakan:

The moral truth exists, like a locomotive, quite independently of whether any particular person takes account of it. Indeed, if I saw you engaged in an orgy of doubt on a railroad track, surely I would be right in pushing you off the track before the locomotive roared by. And the same is true of the good”.⁸

(Kebenaran moral itu ada, seperti sebuah lokomotif, secara benar-benar lepas apakah orang tertentu memperhatikannya atau tidak. Sungguh, jika seandainya saya melihat Anda terlibat dalam pesta keraguan di atas rel kereta api, pastilah saya benar jika saya mendorong Anda keluar rel sebelum lokomotif lewat. Dan samalah halnya dengan masalah kebaikan).

⁸ *Ibid.*, h. 367

Prinsip itu memberi kita peluang untuk “teriak”, atau, “saling-teriak” memperingatkan satu sama lain akan apa yang baik dan benar. Tetapi, “teriak” yang sehat—yang tidak semata-mata merupakan ekspresi kekecewaan, keputusan, ataupun mungkin malah histeri—membutuhkan suasana kebebasan sejati. Dalam kebebasan sejati itu, yang masing-masing orang merdeka untuk memilih suatu keyakinan jalan hidup dan mencoba berbuat baik sesuai dengan keyakinan itu, dimungkinkan terjadinya pola hubungan masyarakat yang bercirikan pertukaran ide dan informasi tentang apa yang baik dan benar. Selanjutnya diikuti dengan pembagian tugas dalam bentuk kewajiban memikul tanggung jawab sosial bersama secara tabah dan sabar. Dan dalam suasana kebebasan sejati itu, para anggota masyarakat mengembangkan kreativitas dan imajinasinya, sehingga tidak terkungkung oleh *idee fixe* yang biasanya menjadi pangkal kefanatikan dan kebuntuan pikiran. Imajinasi yang liar barangkali memang menyesatkan. Tetapi, kekurangan imajinasi adalah berarti kebuntuan dan kemandekan, dan ini bisa lebih buruk lagi. Seperti diingatkan oleh Bernstein, salah seorang tokoh pendiri Partai Sosialis-Demokrat Jerman, dalam menggambarkan keadaan tokoh sosialis lain, yaitu Jaures:

At that time he seemed to me to be suffering from an *idee fixe*. Today I ask myself whether this phrase could not have been better applied to our own attitude. It is not always the daring flight of imagination that leads astray; sometimes the lack of imagination is worse....⁹

(Pada waktu itu ia—Jaures—tampak pada saya terkungkung oleh *idee fixe*. Kini saya bertanya kepada diri sendiri apakah kalimat itu dulu tidak lebih tepat berlaku untuk sikap kita sendiri. Tidak selalu liarnya imajinasi yang berani itu menyesatkan; seringkali kekurangan imajinasi adalah buruk).

⁹ Peter Gay, *The Dilemma of Democratic Socialism, Edward Bernstein's Challenge to Marx* (New York, 1952), h. 278

Karena cita-cita mewujudkan keadilan sosial dalam situasi dilematis perkembangan pembangunan negeri kita sekarang ini adalah kompleks sekali, maka imajinasi atau kreativitas yang diperlukan untuk mewujudkannya tentu juga harus bersifat kompleks. Ini berarti kita tidak bisa hanya mengandalkan ide-ide simplistik. Barangkali inilah tantangan terbesar kita. Dan kita harus mencoba dengan segala kemampuan kita untuk mencari solusinya. [❖]